

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA BUBUSAN KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Ahmad Yani Kosali, SE., SH., MM.^{1*}

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang, Jl. Sukorejo, Sukatani, Kenten,
Perumnas, Palembang.**

***Email : yanikosali@gmail.com**

Abstrak: *Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan tetapi merupakan solusi jangka pendek untuk menghindari masyarakat miskin agar tidak menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Sasaran program ini adalah rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam basis data terpadu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2014.*

Pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program BLSM tersebut, khususnya di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana adanya, serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Adapun hasil pengabdian masyarakat ini, ditemukan bahwa Program BLSM belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah masih belum mempunyai Sumber Daya Manusia / Petugas Pelaksana Program tersebut dalam menjalankan tugasnya, mulai dari sisi pendataan hingga penyaluran bantuan tersebut.

Kata Kunci : *Asset, Solusi, Program, dan Fleksibel.*

1. PENDAHULUAN

Terhitung tanggal 22 Juni 2013 pemerintah telah mengambil keputusan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Terkait dengan kebijakan tersebut, untuk membantu masyarakat miskin telah disiapkan program-program khusus, antara lain Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Program BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan tetapi merupakan solusi jangka pendek untuk menghindari masyarakat miskin agar tidak menjual aset, berhenti sekolah dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Sasaran program BLSM adalah rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam basis data terpadu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2014 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data tersebut Rumah Tangga Sasaran (RTS) diberi Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Kenaikan harga BBM terjadi sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Karena sampai saat ini, kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 masih tetap

memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi BBM. Sekitar Rp. 193,8 Triliun atau 11,5% dialokasikan untuk subsidi BBM tersebut. Konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri tahun ini diperkirakan akan naik lagi menjadi hampir 50 miliar liter. Akibatnya subsidi untuk solar dan premium sepanjang 2013 akan melonjak dari Rp. 193,8 triliun menjadi Rp. 251,6 triliun (sumber: www.news.okezone.com).

Jika harga minyak dunia tetap tinggi dan konsumsi dalam negeri terus naik seperti ini, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara untuk memikulnya. Jadi, sudah tepat keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, meskipun kebijakan ini berdampak pada kenaikan harga BBM yang dirasakan pahit bagi mereka yang selama ini terlena oleh nikmatnya subsidi BBM. Sudah barang tentu kebijakan pengurangan subsidi BBM, dalam jangka pendek ini akan diikuti oleh peningkatan harga yang akan menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan rentan atau '*near poor*'. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif kebijakan jangka pendek yang dapat mempertahankan daya beli kelompok rumah tangga miskin dan rentan.

Program jangka pendek yang dilaksanakan pemerintah adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini, pemerintah memberikan dana tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. BLSM diberikan dalam jangka waktu empat bulan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000,- / bulan. Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta rumah tangga, atau 25 % rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS Tahun 2011 (sumber: www.transparansi.or.id).

Setelah dikururkan BLSM bulan Juli 2013 yang lalu, berbagai reaksi mulai muncul di media massa, terutama terkait dengan adanya data yang dianggap salah sasaran. Ada yang merasa harus menerima, tapi tidak terdaftar dan ada juga yang penerimanya dianggap tidak layak karena dianggap bukan kelompok miskin.

Menanggapi masalah data penerima BLSM, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sebenarnya dari 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLSM, hanya 36,7% atau 5,7 juta RTS yang masuk kategori miskin sesuai garis kemiskinan nasional (*Majalah Tempo*, Juli 2013). Sisanya dikelompokkan sebagai masyarakat hampir miskin (*near poor*) atau rentan miskin, di mana mereka ini rentan menjadi miskin apabila terjadi guncangan ekonomi seperti adanya kenaikan harga barang. Dengan demikian cakupan BLSM sebenarnya sudah cukup luas, tidak hanya kepada masyarakat yang betul-betul miskin, tapi juga masyarakat yang rentan menjadi miskin akibat kenaikan harga barang.

Masalahnya kini terletak pada validitas datanya, mengingat pemerintah menggunakan data berdasarkan hasil survei BPS terakhir Tahun 2011 sebagai acuan penerima data BLSM. Sebelumnya BPS juga telah melakukan dua kali survei, yaitu pada Tahun 2005 dan Tahun 2008. Hal ini dapat diperbaiki dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan penanganan pengaduan masyarakat. Dalam instruksi ini, jelas sekali penggantian kepada penerima BLSM yang salah sasaran dapat segera diganti apabila Kepala Desa atau Lurahnya aktif mendata warganya. (sumber: <http://www.depsos.go.id>).

Beberapa masalah yang terjadi pada masyarakat, seperti : sosialisasi program kurang optimal, pelaksanaan program BLSM Tahun 2013 menggunakan data BPS Tahun 2011 dan penerima BLT Tahun 2005 dan Tahun 2008 sehingga pembayarannya tidak tepat sasaran.

Pelaksanaan BLSM Tahun 2013 memberikan bantuan Rp 150.000,- per bulan kepada RTS dirasa masih sangat kurang dan lokasi pembayaran BLSM hanya terpusat di Ibu Kota Provinsi.

Program jangka pendek yang dilaksanakan pemerintah adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini, pemerintah memberikan dana tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. BLSM diberikan dalam jangka waktu empat bulan dengan besaran bantuan senilai Rp. 150.000,- / bulan. Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta rumah tangga, atau 25 % rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS Tahun 2014.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode pelaksanaan yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

Desa Bubusan saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.785 orang dengan jumlah 465 KK yang tersebar di II Dusun yang ada yaitu: Dusun I dan Dusun II.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementor*) (Widodo,2011:97). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu : **Pertama**, Transformasi informasi (*Transmisi*), Dimensi ini menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. **Kedua**, Dimensi kejelasan informasi (*Clarity*),dimensi ini menghendaki agar informasi yang ada jelas dan mudah dipahami, sehingga bisa menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. **Ketiga**, dimensi konsistensi informasi (*Consistency*), menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Selanjutnya, komunikasi yang dimaksud dalam pengabdian masyarakat ini yaitu : Sosialisasi tentang Program Kompensasi pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh Implementor kebijakan (Pemerintah Desa) kepada Masyarakat (Kelompok sasaran). Pada pembahasan, setelah dilakukan pengabdian di Desa Bubusan dan menelaah berbagai sumber dan referensi melalui hasil komunikasi diperoleh informasi bahwa sosialisasi Program Bantuan Langsung Sementara di Desa Bubusan tidak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak pemerintah (Implementor).

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan sumber daya yang mempunyai peran yang sangat penting, Edward III dalam Widodo (2011 :98) mengemukakan : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini sangat berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya

tersebut di antaranya : Sumber daya manusia (*Staff*), Anggaran (*Budgeting*), Fasilitas (*Facility*), Informasi dan kewenangan (*Information and Authority*), Selanjutnya, setelah dilakukan pengkajian ternyata dalam proses pencapaiannya masih sangat kurang maksimal di mana berdasarkan hasil wawancara di lapangan diperoleh data bahwa ternyata kemampuan perorangan sumber daya manusia para implementor kebijakan kurang cakap dan mumpuni. Selain itu juga terdapat faktor yang sangat mempengaruhi yaitu : fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang belum tersedia.

3. Disposisi

Disposisi merupakan perilaku atau karakteristik yang menempel pada implementor kebijakan. Perilaku atau karakteristik yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah sikap jujur, berkomitmen dan demokratis. Berdasarkan hasil pengabdian di lapangan menunjukkan bahwa proses implementasi program BLSM masih sering terjadi ketidaksesuaian. Alasannya adalah bahwa pada saat validasi data RTS sering dan kerap kali terjadi penyimpangan artinya fakta di lapangan membuktikan bahwa mestinya ada warga masyarakat yang tidak seharusnya masuk sebagai penerima BLSM namun karena memiliki kedekatan emosional, maka warga tersebut pun menerima apa yang mestinya bukan menjadi haknya. Selanjutnya, dalam konteks konsistensi waktu pelaksanaan sering dan kerap kali terjadi pengunduran atau penundaan pencairan tanpa ada kejelasan informasi dan alasan yang pasti. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLSM dalam konteks implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi atau Organisasi

Struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting di mana struktur organisasi ini mempunyai dua aspek yaitu : pertama adalah mekanisme, di mana implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operational Procedure (SOP)*, SOP ini merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang ada, dan kedua adalah struktur birokrasi, dengan tersusunnya struktur birokrasi yang terlalu banyak sehingga pengawasan sudah tidak lagi baik dan aktivitas organisasinya sudah tidak fleksibel. Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dengan warga masyarakat penerima BLSM bahwa implementasi program BLSM masih belum berjalan sesuai yang diamanatkan, hal ini dikarenakan faktor struktur birokrasi yang rumit dan kurang fleksibel sehingga sulit diterjemahkan oleh implementor sehingga memperlambat dan mempersulit untuk melakukan koordinasi terkait dengan mekanisme kerja yang harus dilakukan.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Tolip selaku Kepala Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta masyarakat yang telah membantu peneliti dalam memberikan ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat di lokasi. Selanjutnya, peneliti juga berterima kasih kepada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang yang telah memberikan bantuan pendanaan kepada peneliti untuk melaksanakan kegiatan ini.

5. KESIMPULAN

Secara umum implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang ada di Desa Bubusan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pelaksana program BLSM yang masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas yang dimulai dari pendataan, administrasi dan penyaluran dana BLSM.
2. Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program BLSM yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan transportasi petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya akan ada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan program di lapangan.
3. Struktur birokrasi pembagian kerja petugas yang masih terlalu gemuk, tidak memungkinkan pelaksanaan program BLSM di lapangan dapat dikoordinasikan dengan cepat dan efisien, karena harus menunggu petunjuk dari pelaksana di tingkat kecamatan, terkadang petunjuk itu tidak langsung diberikan kepada petugas lapangan pada saat itu juga, sehingga penyelesaian masalah di lapangan dinilai kurang efektif dan efisien.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. Seventh edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Muhidin, Syarif. 1992. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: STKS-Press.
- Ripley, Randall. B, Grace. A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, S. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2004. *Analisis Kebijakan–Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.
- Buku Pegangan. *Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak*. 2013.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.2003. *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.18 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan GN-RHL.*

<http://www.News.okezone.com> dikunjungi pada tanggal 3 Juli 2013.

<http://transparansi.Or.id> dikunjungi pada tanggal 12 Juli 2013.

<http://www.depsos.Go.id> dikunjungi pada 9 Agustus 2013.

[http://www. Kata ilmu. com](http://www.Kata ilmu. com) dikunjungi pada 4 September 2013.

Majalah Tempo, Juli 2013.